

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan selalu menjadi agenda utama dalam strategi pembangunan ekonomi negara berkembang dan juga menjadi pembahasan penting dalam *Millenium Developments Goal's* (Pamungkas 2007). Salah satu tujuan dari *Millenium Developments Goal's* adalah mengurangi persentase masyarakat miskin, yaitu penduduk yang dibawah garis kemiskinan 1,25 US \$ per hari (Latifah, 2011). Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa garis kemiskinan menggunakan pendekatan kemiskinan absolut, dimana pendekatan menggunakan perhitungan total penduduk yang memiliki pendapatan per kapita yang tidak mampu untuk melakukan konsumsi barang dan jasa (Nurwati, 2008).

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara. Sebagai ukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang sering digunakan adalah Indeks Gini yang melakukan pendekatan pendapatan perseorangan atau distribusi pendapatan yang secara langsung menghitung jumlah penghasilan seseorang tanpa melihat darimana sumbernya (Sastra, 2017).

Pada awalnya pembangunan diidentikkan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita atau disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita, diharapkan mampu memecahkan permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan melalui *trickle down effect* (Kuncoro, 2010). Pada awal tahun 1960-an, sebagian besar Negara Sedang Berkembang (NSB) yang mengalami

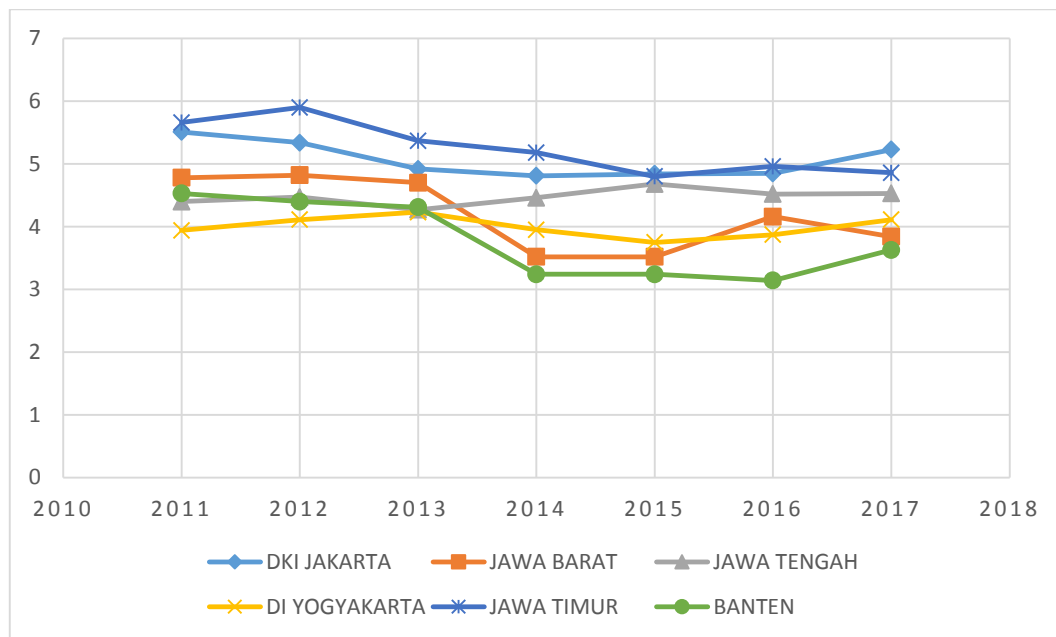
tingkat pertumbuhan tinggi menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi semacam itu hanya memberikan sedikit manfaat dalam memecahkan masalah kemiskinan serta distribusi pendapatan (Arsyad, 2010). Permasalahan utama pembangunan saat ini terutama di NSB bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan distribusi pendapatan (*growth with equity*).

Todaro, Smith, dan Munandar (2006) menyebutkan bahwa tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya dan mengurangi kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi masyarakat akan menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat kemudian dapat mengurangi kemiskinan.

Pendapatan per kapita merupakan indikator yang paling sering digunakan sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu wilayah. Pendapatan per kapita juga digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu wilayah dari masa ke masa dan perbandingan kinerja perekonomian suatu wilayah dengan wilayah lain (Arsyad, 2010). Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang diperoleh dengan jalan membagi pendapatan regional pada suatu periode tertentu dengan jumlah penduduk pada periode yang sama.

Permasalahan distribusi pendapatan terdapat beberapa aspek antara lain: 1) cara meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin yang memiliki tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan; 2) pemerataan pendapatan secara keseluruhan dalam arti meminimalisir ketimpangan tingkat pendapatan antar masyarakat. Keberhasilan mengatasi aspek pertama melihat penurunan jumlah penduduk atau masyarakat yang masih tergolong

pendapatan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan untuk aspek kedua melihat dari tingkat pemerataan pendapatan secara keseluruhan dengan cara melihat peningkatan laju pertumbuhan pendapatan masyarakat yang tergolong miskin dengan pendapatan masyarakat yang tergolong tidak miskin.



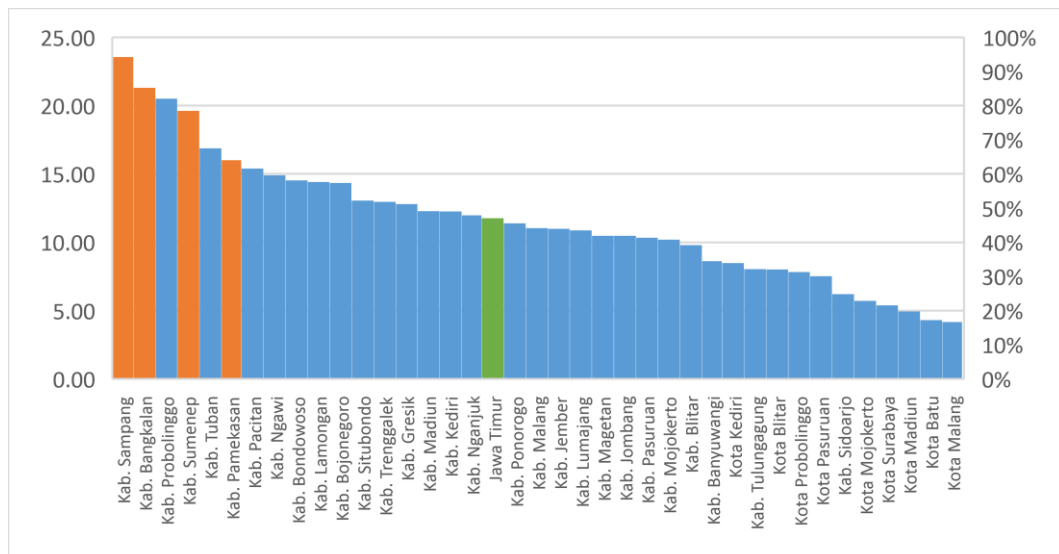
Gambar 1.1. Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita menurut Provinsi Tahun 2014

Sumber: BPS, 2014 (diolah)

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan laju pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi di Pulau Jawa Timur, sebagaimana terlihat dari laju pertumbuhan PDRB per kapita. Pada Gambar 1.1, Laju pertumbuhan Provinsi Jawa Timur tahun 2014 sebesar 5,18 persen, sedangkan Provinsi DKI Jakarta sebesar 4,81. Sehingga pertumbuhan laju pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dibanding pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.

Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai daerah kajian dalam penelitian ini dengan beberapa pertimbangan. Menurut Zamhari, Wisadirana, & Kanto (2017) dalam penelitiannya menjelaskan pertama, dalam lima tahun terakhir, data

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 6,55 persen, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebagai ibu Kota Negara yang mencapai 6,11 persen. Namun di sisi lain, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur yang sama mencapai 4,865 juta orang provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Jawa Timur. Ini berarti meskipun laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mempunyai kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut tidak selalu diiringi oleh penurunan kemiskinan secara signifikan. Kedua, jumlah penduduk yang begitu besar dan bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Selama ini sebagian besar penduduk masih terpusat di Pulau Jawa.



Gambar 1.2. Grafik Persentase Tingkat Kemiskinan

Sumber: BPS Jawa Timur, 2017

Jika ditinjau dari persentase tingkat kemiskinan seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur, masih terdapat daerah yang di atas rata-rata provinsi. Pada Gambar 1.2, menunjukkan bahwa empat kabupaten di Madura memiliki

kemiskinan yang cukup tinggi dengan persentase tingkat kemiskinan sebesar 23,56% di Kabupaten Sampang, kemudian Kabupaten Bangkalan sebesar 21,32%, di urutan berikutnya ada pada di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan dengan masing-masing angka sebesar 19,62% dan 16,00% yang artinya 4 (Empat) Kabupaten Pulau Madura menduduki posisi tertinggi Kabupaten termiskin di Jawa Timur dengan persentase kemiskinan masih di atas 15%. Hal ini yang menjadikan Pulau Madura sebagai wilayah yang cukup tinggi permasalahan ketimpangan dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa Timur.

Selain itu, kondisi ketimpangan antarwilayah dapat dilihat dari keadaan demografis dan ketenagakerjaan. Akai dan Sakata (2005) menemukan bahwa total jumlah penduduk berpengaruh terhadap meningkatnya ketimpangan ekonomi. Dengan bertambah pesatnya penduduk dalam suatu wilayah tanpa ada lapangan pekerjaan yang tersedia, maka akan meningkatkan tingkat pengangguran yang merupakan salah satu penyebab kemiskinan

Berdasarkan dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kondisi kemiskinan rumah tangga di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian penulis mengambil judul **“Analisis Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi kemiskinan rumah tangga di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi kondisi kemiskinan rumah tangga di Provinsi Jawa Timur tahun 2014.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut dalam mengembangkan informasi yang sama maupun aspek yang berhubungan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan pembangunan daerah untuk menyusun rencana pembangunan dimasa mendatang dalam rangka mengatasi ketimpangan yang terjadi pada tiap daerah di Provinsi Jawa Timur.